



PERATURAN DESA LUWORO

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : LUWORO

KECAMATAN : PILANGKENCENG

KABUPATEN : MADIUN



PERATURAN DESA LUWORO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUWORO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun Anggaran; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Luworo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Luworo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-

2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 22);

20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38A Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 39A);
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan lain yang sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan

Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan lain yang sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 57).

25. Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 51A);
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026;
29. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Luworo Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Desa Luworo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Aset Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Lembaran Desa Luworo Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Luworo Kecamatan Pilangkenceng,

Kabupaten Madiun (Lembaran Desa Luworo Tahun 2020 Nomor 7);

32. Peraturan Desa Luworo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Luworo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Luworo Tahun 2025 Nomor 7);
33. Peraturan Desa Luworo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Luworo Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LUWORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUWORO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Anggaran	Rp.	2.843.203.580,85
Realisasi	Rp.	2.844.069.531,64
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	865.950,79
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran	Rp.	1.271.802.363,00
Realisasi	Rp.	1.223.937.262,00
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	47.865.101,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran	Rp.	1.211.888.200,00
Realisasi	Rp.	1.196.854.200,00
Selisih Kurang/Lebih	Rp.	15.034.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Anggaran	Rp.	112.627.000,00
Realisasi	Rp.	107.327.000,00

	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	5.300.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Anggaran	Rp.	29.754.000,00
	Realisasi	Rp.	16.254.000,00
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	13.500.900,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	Anggaran	Rp.	134.108.996,05
	Realisasi	Rp.	126.000.000,00
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	8.108.996,05
	Jumlah Belanja		
	Anggaran	Rp.	2.760.180.559,05
	Realisasi	Rp.	2.670.372.462,00
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	89.808.097,05
	Surplus/Defisit	Rp.	(90.674.047,84)
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
	Anggaran	Rp.	139.292.376,20
	Realisasi	Rp.	139.292.376,20
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	0,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	Anggaran	Rp.	222.315.400,00
	Realisasi	Rp.	222.315.400,00
	Selisih Kurang/Lebih	Rp.	83.023.021,80

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Laporan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - b. Catatan atas laporan keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Luworo.

Ditetapkan di : Luworo

Pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DESA LUWORO,

ttd

IFFAN RIFAI FATUMULOH

Diundangkan di : Luworo

pada tanggal : 20 Januari 2026

SERETARIS DESA LUWORO



DARMANTO
LEMBARAN DESA LUWORO NOMOR 1 TAHUN 2026